

**PENGARUH KEBIJAKAN APBD, INFLASI,
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI INDONESIA (2010-2016)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Alfyan Widianoro
NIM 12020114130128

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Alfyan Widianoro

Nomor Induk Mahasiswa : 12020114130128

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH KEBIJAKAN APBD, INFLASI,
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI INDONESIA (2010-2016)**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Semarang,
Dosen Pembimbing

(Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.)

NIP. 197107251997022001

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Alfyan Widianoro

Nomor Induk Mahasiswa : 12020114130128

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : **PENGARUH KEBIJAKAN APBD, INFLASI,
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI INDONESIA (2010-2016)**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Juni 2019

Tim Penguji

1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si. (.....)
2. Dr. Jaka Aminata, S.E., M.A. (.....)
3. Nenek Woyanti, S.E., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Alfyan Widianoro menyatakan bahwa skripsi dengan judul : pengaruh kebijakan APBD, Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang,

Yang membuat pernyataan

(Alfyan Widianoro)

NIM. 12020114130128

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kau harus menciptakannya”
Chris Grosser

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)." (HR. Muslim)

“Jika kau ingin bisa mengatur orang lain, atur dirimu sendiri dulu”
(Abu Bakar)

***"BARANG SIAPA YANG BERSUNGGUH SUNGGUH, SESUNGGUHNYA
KESUNGGUHAN TERSEBUT UNTUK KEBAIKAN DIRINYA SENDIRI"
(QS. AL-ANKABUT: 6)***

Skripsi ini saya persembahkan untuk Alm. Bapak, Ibu, adik,
saudara, dan orang yang terkasih dalam hidupku.

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of APBD policies, inflation, unemployment and poverty on the Human Development Index in Indonesia during the seven years of the implementation period, namely from 2010-2016. The method used in this study is a data panel with a fixed effect model approach, and using secondary data types.

The results of the analysis concluded that the variables of regional expenditure, inflation, and unemployment had a significant effect on human development index variables. But in the variable Poverty and Regional Income does not affect the human development index. Regional expenditure is the variable that has the greatest influence on human development index variables. During the 7 years of APBD policy on the expenditure side in Indonesia empirically it can be proven that the human development index in Indonesia is increasing every year.

Keywords: Regional Expenditure, Regional Income, Inflation, Unemployment, Poverty and Human Development Index

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan APBD, Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama tujuh tahun periode pelaksanaan, yaitu dari tahun 2010-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan model efek tetap (*fixed effect model*), dan menggunakan jenis data sekunder.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel belanja daerah, inflasi, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Namun pada variabel Kemiskinan dan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Inflasi merupakan variabel yang berpengaruh paling besar terhadap variabel indeks pembangunan manusia selama 7 tahun kebijakan APBD pada sisi pengeluaran di Indonesia secara empirik dapat dibuktikan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia meningkat setiap tahunnya.

Kata Kunci : Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah dan hidayahnya serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan barokahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Kebijakan APBD, Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyusun skripsi ini atas usaha, bantuan, bimbingan, dorongan dan do`a dari berbagai pihak. Maka penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Suharnomo, S.E.,M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan Dekan sebelumnya Prof. Drs. H. Moh. Nasir, M.Si.,Akt.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E.,M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing serta sebagai wakil sekretariat jurusan dan dosen yang paling pengertian di kalangan

mahasiswa yang telah memberikan waktu, perhatian, arahan, dan kesabaran dalam membimbing penulisan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Fitire Arianti, S.E.,M.Si. selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan.
5. Semua dosen, jajaran staff, dan petugas FEB Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua kandung Bapak dan Ibu (Alm Ali Sofyan dan Dwi Purwanti) serta adik saya Aldriansyah Putra Wijaya yang selalu memberikan do`a, kasih sayang, perhatian, waktu, kebersamaan, semangat, dan dorongan baik secara moril maupun materiil dari saya lahir hingga dapat kuliah serta dalam proses penulisan skripsi dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1).
7. Pakde, Om, Bude, dan Tante serta keluarga besar dari orang tua yang telah mendoakan, semangat, dan dorongan untuk proses penulisan skripsi dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1).
8. Orang tua Ayah, Mamah, dan Novia Anggraini yang telah memberikan saya support, dukungan, waktu, kebersamaan serta doa dalam proses penulisan skripsi yang dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1).
9. Teman-teman seperjuangan Universitas Diponegoro yang telah memberikan motivasi, dan dorongan dalam mengambil judul skripsi hingga dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1).
10. Teman-teman KKN (Akbar, Irfan, Faqih, Lazus, Ayu, dan Aulia)

11. Keluarga besar IESP 2014, terimakasih atas semangat, motivasi, kerjasama, suka dan duka dalam menemani melewati masa perkuliahan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1.3.1 Tujuan	18
1.3.2 Kegunaan	19
1.4 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Landasan Teori	21
2.1.1 Peran Pemerintah dalam Perekonomian	21
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	24
2.1.2.1 Penerimaan Pendapatan Daerah.....	26
2.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah.....	29
2.1.3 Belanja Daerah.....	30
2.1.4 Pembiayaan Daerah.....	32
2.1.5 Inflasi	35
2.1.6 Pengangguran.....	38

2.1.7	Kemiskinan	39
2.1.7.1	Mengukur Kemiskinan Absolut	40
2.1.8	Indeks Pembangunan Manusia.....	44
2.1.8.1	Ukuran Holistic Taraf Hidup dan Kapabilitas	45
2.2	Penelitian Terdahulu	47
2.3	<i>Research Gap</i>	58
2.4	Kerangka Pemikiran.....	59
2.5	Hipotesis.....	60
BAB III METODE PENELITIAN		62
3.1	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel.....	62
3.1.1	Variabel Penelitian.....	62
3.1.2	Defenisi Operasional.....	62
3.2	Jenis dan Sumber data.....	64
3.2.1	Jenis Data	64
3.2.2	Sumber Data.....	65
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	66
3.4	Metode Analisis Data.....	66
3.4.1	Estimasi Model Regresi Dengan Panel Data	69
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	73
3.4.2.1	Uji Normalitas.....	73
3.4.2.2	Uji Multikolinearitas	74
3.4.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	76
3.4.2.4	Uji Autokorelasi.....	77
3.4.3	Pengujian Statistik.....	79
3.4.3.1	Uji Koefisien Determinasi (Uji R²).....	79
3.4.3.2	Uji Statistik t (Uji t)	80
3.4.3.3	Uji Statistik F (Uji F)	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		83
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	83
4.1.1	Gambaran Umum Wilayah Indonesia.....	83
4.1.2	Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	88
4.1.3	Anggaran Pengeluaran Pemerintah di Indonesia	91

4.1.3.1	Belanja Daerah di Indonesia	92
4.1.3.2	Pendapatan Daerah di Indonesia	94
4.1.4	Tingkat Inflasi di Indonesia	95
4.1.5	Tingkat Pengangguran di Indonesia.....	97
4.1.6	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia	99
4.2	Analisis Data.....	101
4.2.1	Pengujian Kelayakan Analisis Regresi	101
4.2.1.1	Uji Normalitas Data	101
4.2.1.2	Uji Multikolinearitas	102
4.2.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	103
4.2.1.4	Uji Autokorelasi.....	104
4.2.2	Hasil Analisis Regresi.....	105
4.2.2.1	Estimasi Model Regresi	105
4.2.2.2	Koefisien Determinasi (R^2).....	106
4.2.2.3	Uji Statistik F (Uji F)	107
4.2.2.4	Uji Statistik t (Uji t)	108
4.3	Interpretasi Hasil.....	111
4.3.1	Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia	111
4.3.2	Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	112
4.3.3	Pengaruh Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	113
4.3.4	Pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia	114
4.3.5	Pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	115
BAB V PENUTUP.....		119
5.1	Kesimpulan	118
5.2	Keterbatasan.....	119
5.3	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA		123
Lampiran I.....		127
Lampiran II		136
Lampiran III.....		138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peringkat IPM di Asia Tenggara (2010-2014).....	5
Tabel 1.2 Perbandingan Belanja Pemerintah antar Dua Periode	8
Tabel 1.3 Proporsi Jumlah Penduduk Miskin antar Provinsi dari Total Jumlah Penduduk Miskin Indonesia.....	12
Tabel 1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4.1 Rata-Rata IPM Indonesia (2010-2016).....	89
Tabel 4.2 Hasil Uji Jarque-Bera.....	102
Tabel 4.3 Hasil Uji Correlation Matrix.....	102
Tabel 4.4 Hasil Uji Keonker-Basset.....	103
Tabel 4.5 Hasil Uji Wooldridge.....	104
Tabel 4.6 Estimasi Model Regresi Indeks Pembangunan Manusia.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rata-Rata IPM Indonesia (2010-2016).....	6
Gambar 1.2 APBD di Indonesia (2010-2016).....	7
Gambar 1.3 Proporsi Belanja Daerah Masing-Masing Pulau Terhadap Total Belanja Daerah.....	14
Gambar 1.4 Perbandingan Inflasi Inti dan Inflasi Umum.....	16
Gambar 2.1 Kurva Phillipis.....	35
Gambar 2.2 Lingkaran Setan dari Sudut Permintaan.....	42
Gambar 2.3 Lingkaran Setan dari Sudut Penawaran.....	43
Gambar 2.4 Keterbelakangan Sumber Daya Alam dan Manusia.....	43
Gambar 4.1 Rata-Rata Letak Geografi di Indonesia (2014).....	84
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Pulau.....	85
Gambar 4.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	87
Gambar 4.4 Peta Administrasi Wilayah Indonesia.....	88
Gambar 4.5 Rata-Rata IPM Berdasarkan Pulau.....	91
Gambar 4.6 Rata-Rata Belanja Daerah.....	92
Gambar 4.7 Rata-Rata Belanja Daerah Berdasarkan Pulau.....	93
Gambar 4.8 Rata-Rata Pendapatan Daerah.....	94
Gambar 4.9 Rata-Rata Pendapatan Daerah antar Pulau di indonesia.....	95
Gambar 4.10 Rata-Rata Laju Inflasi Berdasarkan Pulau.....	96
Gambar 4.11 Rata-Rata Tingkat Pengangguran.....	97
Gambar 4.12 Rata-Rata Tingkat Pengangguran Berdasarkan Pulau.....	98
Gambar 4.13 Rata-Rata Jumlah Kemiskinan.....	99
Gambar 4.14 Rata-Rata Jumlah Kemiskinan Berdasarkan Pulau.....	100

Gambar 4.15 Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2014-2016....	117
Gambar 4.16 Penyaluran Dana Bos Tahu 2013-2016.....	118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Mentah	127
Lampiran II Hasil Uji Estimasi	136
Lampiran III Hasil Uji Asumsi Klasik	138

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Sebagian negara terdiri dari kepulauan besar. Indonesia yang membutuhkan strategi dan rencana untuk membangun dan meningkatkan perkembangan perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan melalui UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar kepada semua bidang pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan tujuan agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin baik (Depkeu RI, 2008). Pada tahun 1990 pemerintah merancang tentang desentralisasi di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menciptakan aspek kemandirian dan perkembangan di suatu daerah dan wilayah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme

Transfer ke daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang terjadi antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*). (Depkeu RI, 1990).

Kemampuan daerah untuk mengelola sumber daya dapat dijadikan sumber kekayaan bagi daerahnya. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja, dapat berkembang dalam kegiatan ekonominya, dan dapat menambah pendapatan bagi daerah. Dalam pendapatan tersebut perlu adanya biaya yang akan dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di suatu daerah otonom memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat demokrasi, adil, pemerataan, dan pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan suara dari masyarakat tersebut. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu dengan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2002). Indikasi keberhasilan Otonomi Daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen

keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2004). Selain adanya keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi, tujuannya yaitu untuk meningkatkan dan mengatur kestabilan perekonomian adalah dengan adanya peranan pemerintah dalam kebijakan fiskal. Menurut Todaro (2006), pembangunan memiliki beberapa tujuan:

1. Untuk meningkatkan standar hidup (*level of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self esteem*) setiap orang melalui pembentukan sistem sosial, politik dan ekonomi serta lembaga-lembaga yang meningkatkan martabat manusia dan rasa hormat.
3. Meningkatkan kebebasan (*freedom/democracy*) setiap orang dalam memilih berbagai variabel pilihan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah pusat merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan perekonomian dilakukan dengan adil dan bijaksana.

Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia merupakan masalah yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia. Tinggi rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Dari dimensi pembangunan, tingkat kesejahteraan

masyarakat banyak diketengahkan, berbagai cara penilaian taraf kesejahteraan rakyat dan melalui indikator-indikator terukur dari pencapaian hasil pembangunan. Sejak tahun 1990, Badan dunia UNDP (*United Nations Development Programme*) mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan yang disebut Paradigma Pembangunan Manusia (PPM). Paradigma ini melihat manusia dari sisi yang lebih kompleks dan komprehensif karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non-ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, selain itu dari hasil evaluasi awal yang dilakukan oleh UNDP. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia untuk 2015 adalah 0,689. Ini menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Nilai IPM meningkat 30,5 persen dari nilai pada tahun 1990. Namun IPM Indonesia menurun tajam ke 0,563 (turun 18,2 persen) bila kesenjangan diperhitungkan. Kesenjangan pendidikan dan harapan hidup saat lahir di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata di Asia Timur dan Pasifik, namun Indonesia lebih baik dalam hal kesenjangan pendapatan dan gender dibandingkan dengan rata-rata di kawasan ini (UNDP, 2017). Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat ternyata semakin membaik selama dua dekade terakhir, meskipun laju perbaikannya relatif tertinggal dibanding dengan negara-negara

tetangga. Peringkat dari nilai IPM negara-negara ASEAN dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Peringkat IPM di Asia Tenggara (2010-2014)

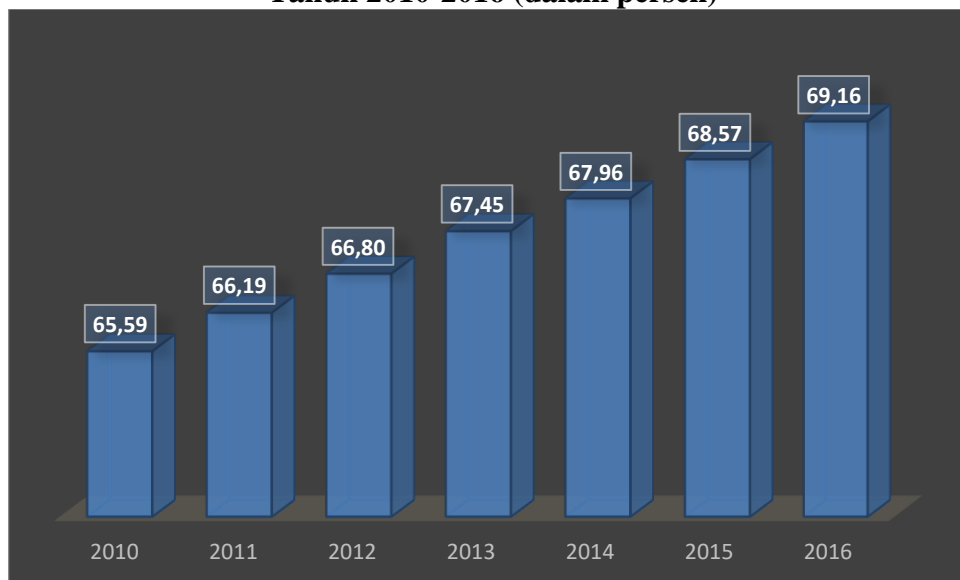
No	Negara	Tahun					Rata-Rata IPM	Kelompok
		2010	2011	2012	2013	2014		
1	Singapore	0,911	0,917	0,92	0,922	0,924	1,1485	Very High
2	Brunei Darussalam	0,846	0,852	0,86	0,863	0,864	1,07125	Very High
3	Malaysia	0,774	0,776	0,779	0,783	0,787	0,97475	High
4	Thailand	0,72	0,729	0,733	0,737	0,738	0,91425	High
5	Indonesia	0,662	0,669	0,677	0,682	0,686	0,844	Medium
6	Philippines	0,669	0,666	0,671	0,676	0,679	0,84025	Medium
7	Viet Nam	0,655	0,662	0,668	0,675	0,678	0,8345	Medium
8	Laos	0,542	0,554	0,563	0,573	0,582	0,7035	Low
9	Cambodia	0,533	0,54	0,546	0,553	0,558	0,6825	Low
10	Myanmar	0,526	0,533	0,54	0,547	0,552	0,6745	Low

Sumber : UNDP, 2016 (data di olah)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan pencapaian Pembangunan Manusia Indonesia berdasarkan Asia Tenggara dari tahun 2010-2014. Indonesia berada di peringkat ke-5 dengan nilai rata-rata IPM sebesar 0,844 dan termasuk kategori kelompok yang *medium*. Hal tersebut dikarenakan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia

tergolong masih tinggi, jumlah penduduk setiap tahunnya meningkat dan nilai inflasi yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014. Sedangkan negara Singapore memiliki rata-rata Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1,1485 dan termasuk kategori kelompok yang *very high*. Hal tersebut Singapore memiliki penduduk yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.

Gambar 1.1
Rata-rata IPM Indonesia
Tahun 2010-2016 (dalam persen)



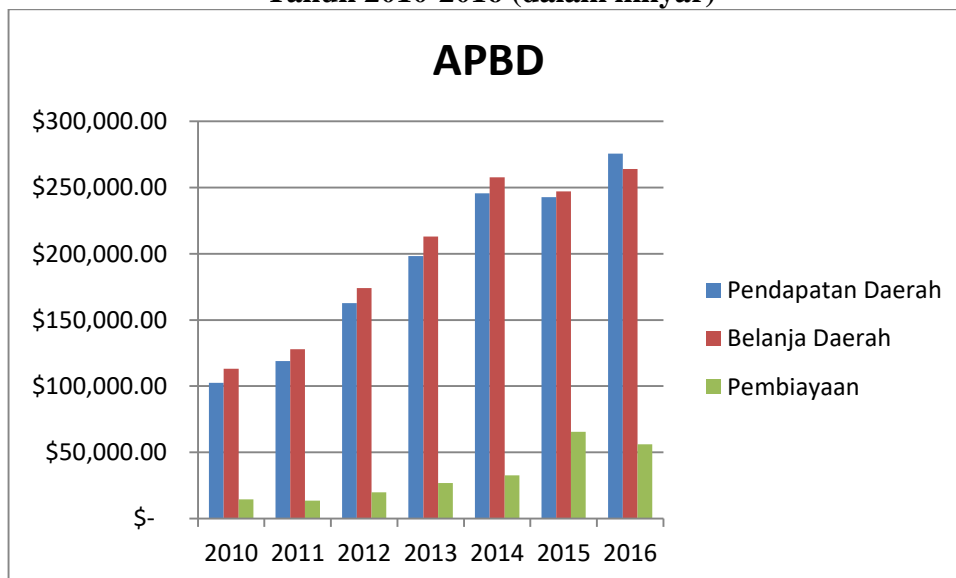
Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia tahun 2016

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan rata-rata IPM dari tahun 2010-2016 mengalami peningkatan secara terus menerus selama periode. Pada tahun 2010 rata-rata IPM sebesar 65,59 persen, dan meningkat sampai dengan tahun 2016 sebesar 69,16 persen. Peningkatan tersebut disebabkan karena nilai inflasi, jumlah kemiskinan, dan jumlah penduduk yang meningkat. Selain itu disebabkan adanya metode baru dan metode lama. Perbedaan metode lama dengan metode baru adalah dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, dan menggantikan

PNB menjadi PDB. Karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Belum optimalnya pencapaian kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah rendahnya kinerja dari pencapaian kesejahteraan masyarakat pada skala pembangunan daerah (Kusreni dan Suhab 2009). Hal ini karena masih belum efektif dan rendahnya alokasi dana pada setiap daerah. Gambar 1.2 menunjukkan bagaimana alokasi belanja daerah yang masih sangat kecil pada tahun sebelum rezim kepemimpinan Joko Widodo. Pembiayaan yang dilakukan untuk daerah juga masih sangat kecil sehingga menyebabkan pembangunan yang kurang optimal di tingkat daerah.

Gambar 1.2
APBD di Indonesia
Tahun 2010-2016 (dalam milyar)



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2014

Secara umum struktur nilai APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah

terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Belanja daerah difokuskan pada belanja modal dimana belanja modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti infrastruktur, gedung olahraga, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain), dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung pemerintahan).

Alokasi belanja pemerintah untuk belanja pada sektor-sektor yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat meningkat sangat signifikan. Tabel 1.2 menunjukkan perbandingan belanja daerah pada periode 2012-2014 dan periode 2015-2017. Terlihat bahwa terdapat peningkatan belanja yang signifikan terutama pada setiap sektor. Hal tersebut sejalan pula dengan *trend* peningkatan IPM Indonesia yang ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Tabel 1.2
Perbandingan Belanja Pemerintah antar Dua Periode (Dalam Triliun Rupiah)

Sektor	Periode	
	2012-2014	2015-2017
Infrastruktur	456,1	912,9
Pendidikan	983,2	1176,6
Kesehatan	145,9	262,3
Perlindungan Sosial	35,3	299,6
DAK Fisik dan Dana Desa	88,6	315,9
Total Tambahan Utang	609,5	1166

Sumber: Kementerian Keuangan (Data Diolah)

Sebelum tahun 2014 (pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendukung

kesejahteraan sosial masyarakat. Pada sektor pendidikan, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengintensitaskan bantuan dana seperti Bantuan Operasional Sekolah untuk bantuan sekolah tingkat SD dan SMP, serta Bidikmisi bagi calon mahasiswa yang kurang mampu. Sepanjang tahun 2005-2013 tercatat bahwa pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp 243,28 triliun untuk Dana BOS. Pemerintah juga melakukan pembangunan gedung pendidikan pada masa tersebut. Jumlah pembangunan gedung SD sederajat sepanjang 2004 hingga 2013 sebanyak 24.030 unit, SMP sederajat sebanyak 27.656 unit dan gedung SMA sederajat sebanyak 15.221 unit, serta perguruan tinggi sebanyak 1.387 unit¹. Beragam program-program pendidikan lain yang juga diinisiasi oleh pemerintahan pada periode tersebut, yaitu program Sarjana Mengajar di daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T), dimana program tersebut mengirim sarjana dari seluruh Indonesia untuk mengajar di daerah 3T selama satu tahun.

Beberapa program pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tetap dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Presiden Joko Widodo pun meningkatkan belanja untuk program pendidikan untuk semakin menunjang kesejahteraan sosial. Program Bidikmisi, BOS, dan SM3T tetap dilaksanakan dan terus dikembangkan. Pada tahun 2016, pemerintah mengirim 3000 sarjana perguruan tinggi untuk mengajar di daerah 3T dan diberikan insentif sebesar Rp 2,5 juta per bulan². Kebijakan-kebijakan baru pun dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar yang manfaatnya sudah

¹ Dikutip dari <https://www.beritasatu.com/pendidikan/178736-sepanjang-2005-2013-pemerintah-kucurkan-dana-bos-rp-24328-triliun.html> pada Tanggal 19 Juni 2019, pukul 20.00.

² Dikutip dari <http://poskotanews.com/2016/09/01/3-ribu-sarjana-ikuti-program-sm3t/> pada tanggal 19 Juni 2019, pukul 20.10.

menjangkau lebih dari 20 juta peserta didik usia 6 hingga 21 tahun ³. Jokowi Widodo juga memberikan fokus yang lebih pada peningkatan kompetensi tenaga kerja. Hal tersebut dilakukan dengan mencanangkan program pemerataan pendidikan dengan memperluas akses rakyat untuk menadapatkan pendidikan yang vokasional. Pemerintah melakukan *link and match* antara SMK dan industri, lalu memberikan pelatihan, kesempatan magang, serta pemberian sertifikasi.

Dari sisi kesehatan, Indonesia memang masih mengalami permasalahan sampai saat ini. Beberapa permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah adalah gizi buruk pada balita, *stunting*, angka kematian ibu melahirkan, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah fokus untuk memanfaatkan anggaran kesehatan untuk pembangunan sarana kesehatan. Pada awal masa pemerintahannya di tahun 2004, pemerintah lewat Departemen Kesehatan mencanangkan asuransi kesehatan, dimana memberikan asuransi bagi orang miskin dengan premi sebesar Rp 5.000,- per kapita per bulan bagi 36.146.700 jiwa penduduk miskin. Hal tersebut berguna agar masyarakat miskin tidak ragu-ragu untuk berobat ke Puskesmas, serta untuk meningkatkan pendapatan dokter yang ada di daerah ⁴. Data pada Kementrian Kesehatan menjelaskan bawa total Puskesmas yang ada di seluruh Indonesia meningkat dari sebesar 9005 unit pada tahun 2010 menjadi sebesar 9731 unit pada tahun 2014. Pada tahun tersebut, jumlah Puskesmas yang sudah dapat melakukan

³ Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4169003/jokowi-bicara-kemajuan-pendidikan-ini-bukti-yang-dipaparkan> pada tanggal 19 Juni, pukul 20.30.

⁴ Dikutip dari <http://www.depkes.go.id/development/site/jkn/index.php?cid=689&id=peningkatan-akses-masyarakat-terhadap-layanan-kesehatan-yang-berkualitas.html> pada tanggal 19 Juni, pukul 21.00

pelayanan kesehatan selalu melebihi target yang ditetapkan. SBY juga mengembangkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Megawati dengan nama PT Asuransi Kesehatan (Askes). Walaupun secara pada tahun-tahun ini, masih terdapat ketimpangan layanan infrastruktur kesehatan seperti masih kecilnya Rasio Posyandu terhadap Desa/Kelurahan di daerah Indonesia bagian timur dibandingkan Indonesia bagian barat, masih tingginya angka *stunting*, dimana pada angka balita pendek meningkat menjadi 37,2% dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 35,6%.

Presiden Joko Widodo meningkatkan anggaran belanja bidang kesehatan hampir dua kali lipat pada masa pemerintahannya. Salah satu programnya adalah meningkatkan intensitas program BPJS yang telah dicanangkan pada masa pemerintahan SBY. Tercatat sampai pada tahun 2016, tagihan yang diajukan oleh pasien BPJS meningkat menjadi sebesar 67 triliun dari tahun 2014 yang sebesar 40 triliun. Membludaknya pasien BPJS pun bahkan membuat kinerja keuangan BPJSK memburuk, yaitu membengkak hingga mengalami defisit lebih dari 4 triliun rupiah pada tahun 2015. Joko Widodo juga mencanangkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) lewat BPJS kesehatan. Program KIS perlu diapresiasi dikarenakan memperluas manfaat dari program kesehatan BPJS Kesehatan yang diluncurkan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga biaya kesehatan mereka ditanggung oleh pemerintah. Berbeda dengan BPJS yang hanya dapat digunakan pada klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang telah terdaftar program BPJS, KIS dapat digunakan di klinik, puskesmas, dan rumah sakit manapun. Hal

ini tentunya sangat mendukung usaha untuk pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

Belum tercukupinya penyediaan anggaran untuk belanja sektor yang meningkatkan kesejahteraan sosial menyebabkan masih terdapatnya permasalahan kemiskinan. Rendahnya kesempatan kerja, kurangnya kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat kesehatan di beberapa daerah menyebabkan timpangnya tingkat kesejahteraan sosial. Data dari Badan Pusat Statistik 2017 menunjukkan bahwa memang tingkat kemiskinan dari tahun 2010 sampai dengan 2016 terus mengalami penurunan. Namun, dapat diperlihatkan pada Tabel 1.3, dimana Pulau Jawa dan Bali yang menjadi penyumbang pertumbuhan perekonomian terbesar untuk Indonesia, justru memiliki tingkat penduduk miskin yang terbesar, yaitu di sekitar 54-56%. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat pembangunan di Pulau Jawa belum berada pada titik yang optimal. Pulau Sumatera yang juga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, menyumbang sekitar 21-22% total tingkat penduduk miskin di Indonesia.

Tabel 1.3
Proporsi Jumlah Penduduk Miskin antar Provinsi
dari Total Jumlah Penduduk Miskin Indonesia

Provinsi	Presentase	
	2010	2016
Sumatera	21.44%	22.42%
Jawa dan Bali	56.40%	54.15%
Nusa Tenggara	6.52%	6.99%
Kalimantan	3.28%	3.33%
Sulawesi dan Maluku	9.08%	9.01%
Papua	3.28%	4.11%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah juga disebabkan karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Tabel 1.4 tingkat pengangguran antar pulau di Indonesia. Terlihat bahwa pada tahun 2010, bahwa pulau Jawa dan Sumatera memiliki tingkat pengangguran tertinggi, dan menyebabkan mereka memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Namun, seiring dengan semakin banyaknya pembangunan di kedua pulau tersebut dikarenakan tingginya tingkat belanja daerah, tingkat pengangguran terbuka di kedua provinsi tersebut berkurang pada tahun 2016. Pulau Kalimantan dan Papua menjadi daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terbesar dan menunjukkan bahwa pembangunan di kedua daerah tersebut masih harus digencarkan.

Tabel 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka

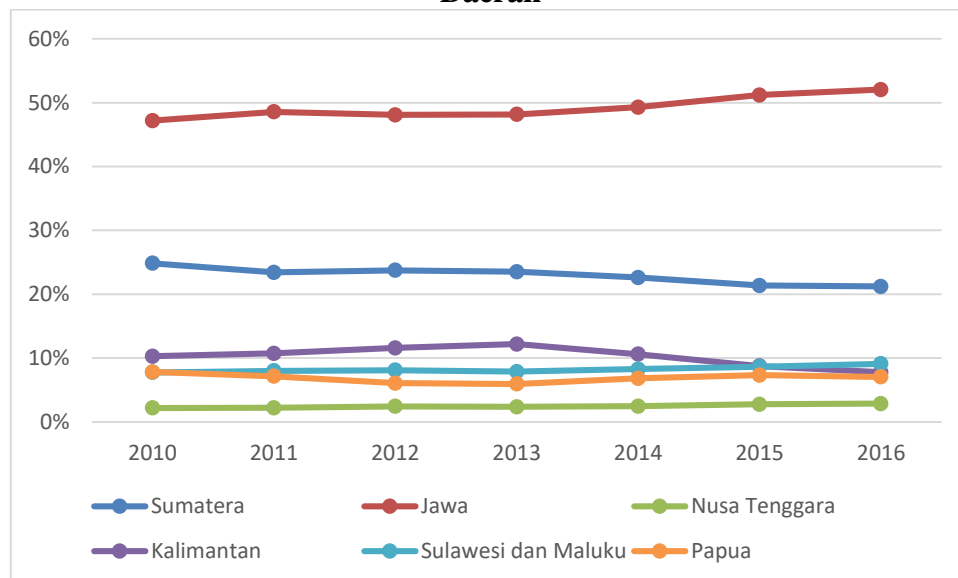
Provinsi	Presentase	
	2010	2016
Sumatera	6.62%	5.25%
Jawa	7.75%	5.34%
Nusa Tenggara	4.31%	3.60%
Kalimantan	4.82%	5.54%
Sulawesi dan Maluku	6.45%	4.27%
Papua	5.62%	5.41%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurunnya tingkat pengangguran di Pulau Sumatera dan Jawa dikarenakan gencarnya belanja daerah pada kedua pulau tersebut. Gambar 1.3 menunjukkan bahwa proporsi belanja daerah di pulau Jawa dan Sumatera terhadap total belanja daerah Indonesia sangat dominan pada kedua daerah tersebut. Namun, belanja daerah di daerah yang masih tertinggal secara sumbangan pertumbuhan perekonomian seperti pulau Nusa Tenggara dan Papua masih sangat sedikit. Hal

tersebut yang dapat ditenggarai menjadi penyebab tingkat pengangguran masih parah.

Gambar 1.3
Proporsi Belanja Daerah Masing-Masing Pulau Terhadap Total Belanja Daerah



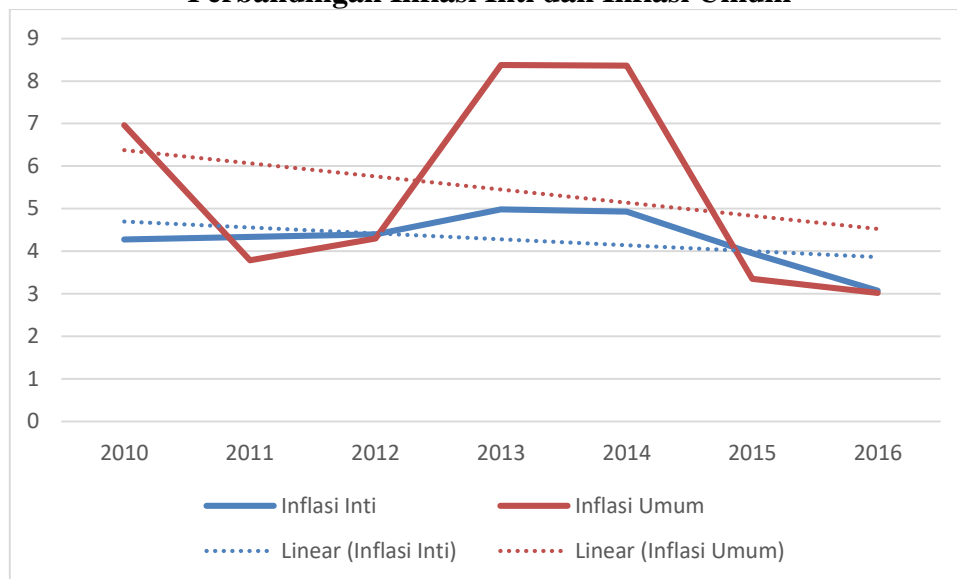
Selain permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran, faktor yang sangat mempengaruhi kesejahteraan adalah bagaimana tingkat daya beli masyarakat. Tingkat daya beli masyarakat akan menentukan bagaimana suatu keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makanan, lalu setelah itu dapat memikirkan bagaimana pendidikan anak serta kesehatan anggota keluarga.

Permasalahan untuk pengelolaan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan pun masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Hal yang dapat menjadi contoh adalah pengelolaan dana DAU dan DAK yang kurang efektif. Permasalahan yang ada, belanja pegawai menghabiskan hampir 36% dari dana transfer pemerintah. Belanja infrastruktur hanya dimanfaatkan tidak sampai 25%. Sri Mulyani juga mengatakan kekecewaannya terhadap pengelolaan dana pendidikan.

kualitas pendidikan yang dihasilkan masih belum sebanding dengan uang yang dikeluarkan pemerintah. Kualitas tersebut tercermin dari skor The Program for International Student Assessment (PISA) yang diterbitkan oleh organisasi negara-negara maju (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD). Di 2018, Indonesia menempati posisi 62 dengan skor PISA sebesar 395,3. Angka ini jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dengan skor 556, Thailand dengan skor 415. Skor tersebut bahkan tertinggal dengan Vietnam yang bisa mencapai 495.

Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat selain dari kebijakan pemerintah. Salah satu yang paling dominan adalah adanya pengangguran dan kemiskinan. Dimana nilai harga (inflasi) tinggi serta pengangguran dan jumlah kemiskinan tinggi, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Data pada Gambar 1.4 menunjukkan bagaimana perbandingan perkembangan tingkat inflasi umum yang menunjukkan harga barang secara keseluruhan dengan inflasi inti yang menunjukkan bagaimana tingkat daya beli konsumen. Terlihat bahwa harga-harga secara umum apabila ditarik garis *trendline* (linear (inflasi umum)) terus menurun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Namun, dapat diperhatikan pula, *trendline* dari inflasi inti (linear (inflasi umum)) juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa walaupun secara umum harga-harga secara keseluruhan menurun, namun daya beli masyarakat secara keseluruhan juga menurun. Daya beli masyarakat yang menurun dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Gambar 1.4
Perbandingan Inflasi Inti dan Inflasi Umum



Sumber: Badan Pusat Statistik

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh MC Khuzaironi (2015) tentang Pengaruh Kebijakan APBD dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah (2009-2013) yang menjelaskan bahwa kapasitas fiskal menggunakan variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan serta kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari sisi pengeluaran rumah tangga, pendidikan, kesehatan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Erwin, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas tiga alokasi kebijakan pokok yaitu pendapatan, alokasi belanja modal, dan pembiayaan daerah yang merupakan salah satu alat

untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan dan otonomi daerah dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dimana peran pemerintah dalam kebijaksanaan APBD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pengaruh kemiskinan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada 33 Provinsi di Indonesia dengan jangka waktu tujuh tahun, yang dibatasi pada tahun 2010-2016. Maka judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Kebijakan APBD, Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (2010-2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan kebijakan pemerintah melalui alokasi pendapatan, belanja modal yang disusun oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur serta menyusun anggaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan alokasi anggaran pemerintah dan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk permasalahan yang kompleks. Dengan belum optimalnya belanja daerah dan pengelolaan pendapatan daerah, serta anggaran pemerintah yang belum optimal ke daerah tersebut, maka daerah tersebut akan sulit untuk memanfaatkan potensi perekonomian di daerahnya sehingga terciptanya pengangguran akibat sulitnya penciptaan lapangan pekerjaan. Akibatnya kesejahteraan sosial menjadi terganggu, dimana banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan yang juga menunjang kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut untuk melakukan kegiatan perekonomian. Di sisi lain, infrastruktur yang kurang merata antar daerah akibat belum optimalnya anggaran

ke daerah menyebabkan tidak mudahnya penyaluran barang-barang kebutuhan pokok sehingga menyebabkan harga-harga barang kebutuhan menjadi mahal. Hal tersebut pada akhirnya menjadi permasalahan pula bagi kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan pertanyaan yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap tingkat indeks pembangunan manusia?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan daerah terhadap tingkat indeks pembangunan manusia?
3. Bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap tingkat indeks pembangunan manusia?
4. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat indeks pembangunan manusia?
5. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap tingkat indeks pembangunan manusia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia

2. Menganalisis pengaruh pembiayaan daerah terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia
4. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia

1.3.2 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada peran pemerintah di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kegunaan ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi pembangunan.
3. Kegunaan kondisi untuk pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan pengaruh Kebijakan APBD, Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (2010-2016)

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi variabel penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil dari analisis data, interpretasi dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan